



**PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI NAGARI BALIMBING**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Ekonomi Syariah*

Oleh :

EKA KHARISMA
NIM. 1730402021

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
1442 H/2021 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Kharisma
Nim : 1730402021
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **"PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI NAGARI BALIMBING"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



EKA KHARISMA
NIM 1730402021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Eka Kharisma, NIM 1730402021, dengan Judul **“PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI NAGARI BALIMBING”** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 11 Juni 2021

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Gampito SE., M.Si
NIP. 196702192005011005

Pembimbing



Tezi Asmadia, ME., Sy
NIP. 199006192019032006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar






Dr. H. Rizal M.Ag., CRP
NIP. 19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Eka Kharisma, NIM 1730402021, Judul **PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI NAGARI BALIMBING**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Tezi Asmadia, ME., Sy NIP. 199006192019032006	Ketua Sidang/ Pembimbing		6/8-2021
2	Gampito, SE., M.Si NIP. 196702192005011005	Penguji I		4-8-21
3	Khairulis Shobirin, SE., MM -	Penguji II		3/8 21

Batusangkar, 15 Juli 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H/Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 2002121 001

ABSTRAK

EKA KHARISMA. NIM 1730402021. Judul Skripsi : **“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Nagari Balimbing”**. Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah dilakukan sebuah Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di nagari balimbing menunjukkan bahwa PKH belum bisa mengentaskan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menunjukan secara berangsur-angsur dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Nagari Balimbing, yaitu dibuktikan dengan adanya masyarakat yang graduasi mandiri atau KPM yang berakhir kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat, dari segi pendidikan masyarakat miskin yang menerima bantuan PKH dapat meningkatkan pendidikan bagi anak-anaknya, dan dari segi pendapatan masyarakat miskin penerima PKH sudah mulai mengalami peningkatan perekonomiannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Kemiskinan.....	8
a. Pengertian Kemiskinan.....	8
b. Penyebab Kemiskinan	9
c. Dampak Kemiskinan	11
d. Program Pengentasan Kemiskinan	13
e. Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan	14
f. Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam	16
2. Kesejahteraan	18
a. Pengertian Kesejahteraan	18
b. Indikator Kesejahteraan.....	19
c. Unsur-Unsur Kesejahteraan.....	21
d. Faktor Lain yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan	23
e. Kesejahteraan Menurut Islam.....	24
3. Program Keluarga Harapan (PKH)	25

a. Pengertian PKH dan Dasar Hukum PKH.....	25
b. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	27
c. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH).....	27
d. Kriteria Komponen Program Keluarga Harapan.....	27
e. Hak dan Kewajiban PKH.....	28
f. Program Bantuan Komplementer.....	30
g. Peran PKH dalam Pengentasan Kemiskinan.....	37
B. Penelitian Yang Relevan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	45
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Temuan Penelitian.....	46
1. Sejarah Nagari Balimbing.....	46
2. Visi Dan Misi Nagari Balimbing.....	47
3. Kondisi Geografis.....	49
4. Kondisi Topografi.....	50
5. Kondisi Hidrologi.....	50
6. Kondisi Demografi.....	50
7. Perekonomian.....	54
8. Pertanian, Perkebunan, Fasilitas Umum, Tanah Basah/Kolam dan Tanah Permukiman.....	54
9. Peternakan.....	55
10. Pariwisata Religius.....	56
11. Perdagangan.....	56
B. Pembahasan.....	56

1. Deskripsi Hasil Penelitian Peserta PKH.....	56
2. Deskripsi Hasil Wawancara Pendamping PKH	62
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Angka Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar	4
Tabel 1. 2 Angka Kemiskinan Kecamatan Rambatan	4
Tabel 1. 3 Angka Kemiskinan Nagari Balimbing	5
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian	41
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kepadatan Nagari Balimbing Tahun 2018-2020	51
Tabel 4. 2 Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Balimbing Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020	52
Tabel 4. 3 Indeks Dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial PKH Tahun 2021	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan telah lama menjadi momok pembangunan di Indonesia. Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi terutama di desa-desa yang tertinggal. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan (Dzafina, 2019 : 74). Pasca krisis keuangan asia tahun 1998, perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Kondisi ekonomi Indonesia tumbuh dengan performa yang cukup baik, kondisi ekonomi yang terus stabil berdampak pada terjadinya lompatan kelas menengah baru dan jumlah penduduk miskin terus berkurang.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia pasca krisis melewati periode yang cukup mengesankan. Berdasarkan data BPS menunjukkan pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,20 % dan pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 9,82%.

Dari sisi kerentanan ekonomi, Indonesia termasuk kategori negara dengan yang cukup tinggi, masih banyak penduduk Indonesia yang hidup sedikit diatas garis kemiskinan. Peristiwa yang berakibat guncangan ekonomi dapat menyebabkan lonjakan rumah tangga miskin yang baru. Ukuran kemiskinan nasional yang ditetapkan BPS berdasarkan pendekatan pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan mendasar terlalu rendah, sehingga jumlah penduduk yang masuk kategori miskin relatif sedikit. (Nursan, 2020 : 2)

Penduduk Indonesia juga dapat dikelompokkan menurut stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi menjadi tiga kelompok :

- a. Kalangan atas, adalah mereka yang mempunyai banyak kekayaan, serta mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak atau bahkan dengan sangat berlebihan.
- b. Kalangan menengah, adalah mereka yang hidup serba cukup serta dengan mudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya

kebutuhan pokok

- c. Kalangan bawah, adalah mereka yang termasuk miskin karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan baik khususnya kebutuhan primer. (Herabudin, 2015 : 144)

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan yang dialami oleh individu ataupun sekelompok orang dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mengakibatkan hidup menjadi tidak nyaman serta dapat mengancam penegakkan hukum dengan adil, terancamnya bargaining (posisi tawar) pada pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnya masa depan bangsa dan negara. (Suwandi, 2015 : 80)

Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang kondisi ekonominya dibawah batas tertentu, yang biasa dikenal dengan aris kemiskinan. Individu bisa dikatakan telah hidup dengan sehat jika telah memenuhi kebutuhan energy sejumlah 2100 kalori setiap harinya. Jika dilihat berdasarkan ukuran itu, maka jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan harian setaip bulannya untuk memenuhi kalori tersebut. Supaya individu dapat hidup dengan sangat layak maka kebutuhan dasarnya harus dapat dipenuhi dengan baik seperti makan, minum, rumah, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lainnya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa factor seperti kualitas sumber daya manusia (*human capital*), modal fisik produktif (*physical productive capital*), status pekerjaan, dan karakteristik desa. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam sebuah keluarga akan sangat mempengaruhi mampu atau tidaknya suatu keluarga dalam hal memenuhi kebutuhannya serta mempengaruhi jumlah pendapatannya. Tidak hanya itu, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan serta mengelolanya dengan baik juga merupakan syarat utama agar dapat menjadi masyarakat yang lebih sejahtera (Suwandi, 2015 : 81-82)

Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Untuk menyelesaikan mengatasi masalah ini. Perluasan terhadap penerima berbagai bantuan sosial yang telah dilakukan pemerintah memerlukan pengentasan

validasi terhadap keluarga penerima manfaat bantuan sosial agar tepat sasaran. Kemiskinan adalah salah satu penyakit sosial yang harus diselesaikan lewat tindakan solutif yang fleksibel atau sesuai dengan kondisi masing-masing komunitas dan masyarakatnya. (Dzafina, 2019 : 74-75)

Usaha dalam hal menurunkan angka kemiskinan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang dinamai dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan berupa uang tunai pada masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM. Penerima harus memenuhi persyaratan serta menjalankan kewajiban serta ketentuan. Tidak hanya di Indonesia, namun program ini telah dijalankan di dunia Internasional dengan nama *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau program bantuan tunai bersyarat. (Keuangan, 2015 : 5)

Penyaluran bantuan yang dilakukan berupa bantuan pendidikan, kesehatan dan sosial. Pada bulan agustus 2020 masyarakat penerima bantuan untuk pendidikan berjumlah 383 orang, bantuan kesehatan berjumlah 97 orang dan untuk sosial berjumlah 71 orang, dan setiap bulannya masyarakat penerima bantuan mendapatkan bantuan sembako yang berupa beras, daging ayam, cabe dan telur. (Bapak Yasripen, Wawancara Langsung, 01 Maret 2021)

Adapun program PKH ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan serta memutus rantai kemiskinan di Indonesia, dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan bimbingan untuk perubahan pada tingkah laku agar kesejahteraan dapat terwujud. (Keuangan, 2015 : 6)

Agar penurunan kemiskinan dapat segera terlaksana, maka semenjak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan salah satunya adalah program PKH. Hal ini telah terbukti di dunia Internasional bahwa mampu menurunkan angka kemiskinan yang dihadapi oleh berbagai Negara.

Adanya PKH ini akan mendukung serta memberikan akses lebih pada masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta

kesejahteraan sosial. Program ini diharapkan dapat dilakukan dengan berkelanjutan. Selain itu, program PKH juga diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Keluarga penerima manfaat PKH haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta mengikuti dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah disediakan. Fasilitas kesehatan dapat berupa asupan gizi bagi ibu hamil dan balita, begitu juga dengan orang tua yang lanjut usia. Sedangkan dalam bidang pendidikan, diharapkan masyarakat dapat mengiringi anaknya untuk bersekolah baik secara formal ataupun tidak formal, minimal untuk memenuhi standar wajib belajar Sembilan tahun. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 70 tahun. (pkh.kemensos, 01 Maret 2021)

Tabel 1. 1
Angka Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	369.833	18.480	5,32%
2019	379.041	16.200	4,66%

Sumber: <https://tanahdatarkab.bps.go.id/indicator/23/51/1/indikatorkemiskinan.html>

Tabel 1. 2
Angka Kemiskinan Kecamatan Rambatan

Nagari	Penduduk Miskin	Persentase
Rambatan	2.383	15,57%
Padang Magek	2.497	16,31%
III Koto	3.217	21,02%
Balimbing	3.453	22,56%
Simawang	3.754	24,53%

Sumber: Data Angka Kemiskinan Kecamatan Rambatan Tahun 2018

Tabel 1. 3
Angka Kemiskinan Nagari Balimbing

Nama Jorong	2018	2019
Kinawai	1.360	1.357
Balimbing	890	888
Bukit Tamasu	422	420
Sawah Kareh	613	611
Padang Pulai	168	167
Jumlah Penduduk Miskin	3.453	3.443
Jumlah Penduduk	8.783	8.808
Persentase	39,31%	39,09%

Sumber: Data Angka Kemiskinan Nagari Balimbing Tahun 2018-2019

Data diatas menunjukkan pada akhir tahun 2019 bahwa Nagari Balimbing mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,22%, dan dari angka kemiskinan di kecamatan Rambatan Nagari Balimbing menempati jumlah penduduk miskin terbanyak nomor dua yang mana 22,26% angka kemiskian di kecamatan Rambatan berasal dari Nagari Baimbing.

Dari hasil wawancara angka tingkat kemiskinan nagari Balimbing tiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan kemiskinan salah satunya disebabkan oleh adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Akan tetapi, dari data di atas dapat dilihat angka kemiskinan Nagari Balimbing masih tinggi. (Bapak Yasripen, Wawancara Langsung, 30 November 2020)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “**PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI NAGARI BALIMBING**”

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka fokus penelitian penulis adalah peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang akan menjadi permasalahan adalah Bagaimana Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penulisan

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Khususnya yang berkaitan dengan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat pada Nagari Balimbing serta dijadikan sebagai bahan pengembangan pikiran dalam bidang Ekonomi Syariah. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi.

2. Luaran Penelitian

Target yang ingin peneliti capai dari temuan ini adalah diterbitkan sebagai jurnal ilmiah IAIN Batusangkar dan bermanfaat sebagai bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari judul yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Program PKH merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara

Internasional dikenal sebagai program *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau program bantuan tunai bersyarat.

2. Mengentaskan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cara melaksanakan program pengentasan kemiskinan agar masyarakat sejahtera.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kata Miskin adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab yaitu kata yang menuju pada kefakiran berat sebagaimana firman Allah dalam Qs al-Balad (90) : 16. Kata fakir berasal dari bahasa Arab *al-faqr* berarti membutuhkan (*al-ihtiyaj*) sesuai dengan firman Allah dalam Qs al-Qashash (28):24. Tokoh pembaharu Islam, Imam Al-Ghazali telah menegaskan bahwa miskin yaitu setiap individu yang memiliki pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Pemenuhan kebutuhan ini baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga (Chaniago, 2015 : 51)

Shirazi (1994) dan Pramanik (1993, 1998), mengemukakan bahwa miskin adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai pendapatan yang cukup demi memenuhi kebutuhan dasarnya, hal ini juga menyebabkan hidup yang kurang nyaman dari aspek ekonomi, psikologi, serta aspek sosial lainnya (Arsyianti, 2017 : 68)

Lewis (1966), berpendapat bahwa miskin yaitu suatu budaya yang terjadi sebagai akibat dari penderitaan ekonomi (*economic deprivation*). Hal ini terjadi sejak lama hingga langkah yang diambil untuk beradaptasi terhadap suatu kondisi menyebabkan mereka menjadi lebih marginal dan bersifat kapitalistik.

Baker (1980), berpendapat bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana individu tidak sanggup memelihara hidupnya serta tidak dapat menjaga taraf hidupnya dengan baik. Mereka biasanya tidak nyaman menikmati hidup serta mendapat gangguan mental dan juga fisik secara besar-besaran. Tidak hanya dari aspek ekonomi, namun kemiskinan juga terlihat dari aspek sosial budaya.

Soekanto (1981), mengemukakan bahwa kemiskinan yaitu suatu kondisi dimana individu selalu berkekurangan dari segi banyak hal, baik makanan, minuman, pakaian, serta rumah sebagai tempat berlindung. Kemiskinan juga erat kaitannya dengan kualitas hidup seseorang. Mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak sebagai seorang warga Negara. (Setyorini, 2013 : 9)

Saat ini, kemiskinan merupakan suatu masalah besar yang banyak dihadapi oleh berbagai Negara berkembang. Masalah ini adalah masalah yang sangat kompleks hingga dibutuhkan cara penanganan yang baik dan bijak untuk menghadapinya atau untuk terus menekan angka kemiskinan. Dalam kamus webster kemiskinan yaitu kondisi dimana seseorang serba tidak cukup dalam hal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tersebut kesehatan dan pendidikan. (Gampito, 2016 : 39-40)

Dari definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, dan papan.

b. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan antara lain menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan budaya sebagai berikut :

1) Kemiskinan Natural atau Alami

Kemiskinan ini terjadi karena sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tidak mencukupi. Berikut ini adalah kemiskinan yang timbul secara alami, yaitu:

- a) Teknologi yang digunakan masih sangat rendah dalam hal pertanian.
- b) Tingkat investasi yang rendah sebagai akibat dari surplus produksi yang juga rendah
- c) Pengeluaran wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan tinggi yaitu lebih dari 70%

- d) Lahan yang akan digunakan untuk agraris sangat berkualitas rendah
- e) Wilayah memindahkan sumber daya berkualitas ke luar daerah.

2) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini terjadi karena akibat dari setiap kebijakan dan peraturan serta keputusan pemerintah tentang pembangunan kurang tepat. Kemiskinan ini terlihat dari ketimpang-ketimpangannya antara lain orang yang memiliki sumber daya, kesempatan untuk membuka usaha, serta banyak factor lain yang berakibat pada ketimpangan kehidupan sosial.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh perilaku masyarakat dan individu yang erat kaitannya dengan gaya hidup dan kebiasaan yang akhirnya menjebak dirinya sendiri menjadi miskin (Dahuri, 2012 : 181-183)

Ada beberapa faktor yang dominan menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain :

1) Faktor individual

Penyebab kemiskinan yang utama adalah faktor individu atau internal. Faktor ini juncul dari dalam diri masing-masing individu seperti sikap malas bekerja, tidak ada motivasi, tidak disiplin serta tidak mampu dalam hal mengatur waktu. Hal ini lah yang menyebabkan produktifitas menjadi menurun serta berimbas pada pendapatan yang rendah.

2) Faktor non individual

Faktor non-individual bisa juga disebut dengan faktor eksternal. Faktor ini tentu saja berasal dari luar diri setiap individu, semua faktor ini diluar kendali setiap orang contohnya adalah bencana alam. Tidak hanya itu, pemerintah yang suka korupsi dan bersikap seenaknya juga dapat memicu kemiskinan pada suatu Negara.

Kebijakan yang dikeluarkan tidak mempertimbangkan rakyat miskin. Atau bisa juga kemiskinan ini terjadi karena keteledoran masyarakat hingga merusak tatanan hidup dan lingkungan.

3) Faktor visi teologi yang represif

Represif bermakna menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Hal ini berhubungan dengan cara pikir mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang sudah merupakan takdir dan tidak dapat di ubah. Hal ini biasanya sangat banyak berkembang pada suatu kelompok masyarakat yang lekat dengan ajaran agama. Mereka cenderung melihat bahwa kemiskinan yang terjadi adalah yakdir dari Tuhan dan manusia hanya bisa menjalaninya saja. (Subhan, 2019 : 29)

Jika dilihat dengan cara yang lebih luas, amak kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak factor yang kemudian dibagi menjadi: kemiskinan kultural, natural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: malas, tidak disiplin, boros dan lain sebagainya. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti: karena cacat, sakit, lanjut usia, dan karena bencana alam. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti: distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. (Murdiansyah, 2014 : 76)

c. Dampak Kemiskinan

Banyak masyarakat miskin tentu saja memberikan dampak dan pengaruh negative yang sangat banyak dalam masyarakat, seperti:

1) Pengangguran

Salah satu dampak dari banyak nya masyarakat miskin adalah bertambahnya angka kemiskinan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kurangnya pendidikan, serta keterampilan yang dimiliki

oleh masyarakat hingga mereka mengalami kesulitan untuk menemukan pekerjaan. Lebih jauh lagi, hal ini berakibat pada tidak mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kemudian juga akan menyebabkan kurangnya nutrisi dan gizi hingga munculah masalah kesehatan yang serius.

2) Kriminalitas

Dampak lainnya yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Akibat dari masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akhirnya banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak masyarakat yang nekat untuk berbuat kriminal seperti mencuri, membunuh, melakukan begal, penjambretan dan banyak lagi tindak kriminal lainnya. Hal ini terjadi tentu saja karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan factor lain adalah kurang terpenuhinya aspek spiritualitas dalam dirinya.

3) Putusnya sekolah

Karena banyaknya masyarakat miskin yang akhirnya berakibat pada putus sekolah pada anak suai sekolah. Biaya pendidikan yang tergolong mahal akhirnya menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu mengirim anaknya ke bangku sekolah. Bahkan hal ini menyebabkan anak tidak dapat tumbuh dengan baik serta menghambata anak untuk bisa memiliki keterampilan. Lebih jauh lagi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak anak adalah anak tidak dapat mencapai cita-cita yang diinginkannya. Akhirnya kemampuan untuk bersaing di dunia global maupun local akan terjadi, imbasnya lagi anak tidak dapat menemukan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan apapun

4) Kesehatan

Masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi nutrisi pada anggota keluarganya tentu saja akan berimbas pada kesehatan setiap anggota keluarga. Belum lagi akses pada fasilitas kesehatan

yang cukup mahal. Pada akhirnya masyarakat miskin tidak dapat menanggung biaya pengobatan yang mahal dan membiarkan penyakit menyebar begitu saja tanpa adanya usaha untuk mengobati.

5) Buruknya generasi penerus

Hal ini adalah hal yang paling berbahaya dari kemiskinan. Masyarakat atau suatu bangsa pada akhirnya tidak dapat menciptakan dan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Banyak anak yang harus menderita gizi buruk, tidak mengenyam dunia pendidikan serta banyaknya penyakit dalam tubuh anak. Hal ini tentu saja menyebabkan anak akan tumbuh dan berkualitas menjadi tidak berkualitas dan tidak memiliki daya saing yang baik. Oleh karena itu, sangat penting agar orang tua dapat sadar dan memenuhi hak dari setiap anaknya khususnya hak mendapatkan pendidikan yang layak. (Itang, 2015 : 5-7)

d. Program Pengentasan Kemiskinan

Dalam hal upaya mengentaskan kemiskinan maka telah diatur dalam aturan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam aturan ini telah ditegaskan bahwa demi mempercepat penurunan angka miskin anatar 8% hingga 10% di akhir tahun 2014. Maka dari itu, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut:

- 1) Klaster I, yaitu kelompok yang kemiskinan berdasarkan bantuan perlindungan sosial. Tujuan dari program ini yaitu untuk membantu masyarakat miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sehingga masyarakat miskin dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Adapun mekanisme dari pemberian bantuan ini yaitu dengan cara langsung

termasuk di dalamnya program JAMKESMAS, RASKIN, BSM, serta PHK.

- 2) Klaster II, yaitu kelompok miskin yang berdasar pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari program ini yaitu agar masyarakat dapat lebih mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada untuk dapat dibimbing dan dikembangkan melalui potensi-potensi yang dimilikinya. Program ini disebut juga dengan PNPM Mandiri.
- 3) Klaster III, yaitu kelompok yang akan diberdayakan melalui usaha mikro. Pemerintah akan memberikan akses dan fasilitas memadai agar masyarakat dapat membuka usaha dalam skala kecil dan menengah. Contoh dari program ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Marini, 2018 : 35)

e. Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah mempunyai peranan besar dalam usaha menanggulangi kemiskinan di tanah air. Berikut ini adalah tiga hal dasar untuk menekan kemiskinan, yaitu:

- 1) Pembangunan perekonomian berkelanjutan serta proaktif terhadap kemiskinan
- 2) Pemerintah yang bertanggung jawab
- 3) Melakukan pemerataan dalam hal pembangunan sosial

Agar strategi di atas dapat diciptakan dan diimplementasikan maka sangat diperlukan langkah yang tepat sasaran. Untuk mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan, seperti:

- 1) Suasana yang tentram dan stabil adalah hal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Program pengentasan kemiskinan harus dipastikan stabil selama proses pelaksanaannya.

- 2) Penduduk hendaknya dapat dikendalikan dan dikontrol agar program pengentasan kemiskinan dapat dijalankan. Menciptakan keluarga yang sejahtera akan berimbas pada strategi yang akan diaplikasikan untuk menekan angka kemiskinan.
- 3) Mempertimbangkan lingkungan hidup. Dengan cara melestarikan lingkungan yang juga merupakan sumberdaya untuk menunjang kesejahteraan tentu dapat ikut serta dalam peran menekan angka kemiskinan.
- 4) Program hendaknya dijalankan secara berkelanjutan. Program harus bisa dijalankan dengan cara mandiri dan dengan cara memberdayakan setiap sumber daya yang ada. Sehingga masyarakat miskin dapat mandiri dalam melakukan dan mengembangkan setiap bentuk usahanya hingga bisa menjadi lebih produktif. Berikut ini adalah beberapa usaha nilai tambah pada setiap perbaikan aspek kesejahteraan dapat dipenuhi yaitu:
 - a) Mendapatkan akses untuk menggunakan sumber daya yang ada
 - b) Mendapatkan akses untuk menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara yang lebih efektif dan efisien.
 - c) Mendapatkan akses pada suatu pasar. Setiap jasa maupun produk yang telah diciptakan dapat dijual di pasar untuk mendapatkan penghasilan. Maka dapat diartikan bahwa setiap proses produksi yang dilakukan harus diimbangi dengan pasar yang tersedia.
 - d) Akses terhadap sumber pembiayaan.
- 5) Mendelegasikan wewenang dalam hal perencanaan, serta menekan angka kemiskinan agar menjadi lebih rendah. Wewenang yang didelegasikan harus diberikan pada aparat yang memiliki tanggung jawab tinggi serta memiliki pengetahuan yang cukup. Maka dari

itu, pemerintah perlu untuk mengambil peranan penting dalam menjunjang penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.

- 6) Tekanan yang harusnya diberikan untuk menekan angka kemiskinan adalah diberikan pada yang bersangkutan atau pada masyarakat miskin itu sendiri. Hal ini karena manusia itu sendiri merupakan (*invest in people*) berhubungan dengan bidang kesehatan dan pendidikan. Kedua hal ini sangat berhubungan dengan akses yang rata dan juga mengutamakan kualitas yang baik.
- 7) Pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu, dan kelompok masyarakat lain. Hal ini diperlukan usaha yang serius dalam menanggulangnya serta perlu dilakukan dengan seleksi yang ketata agar dapat tepat sasaran. Program ini bersifat khusus dan dilaksanakan secara selektif. Adapaun cara yang tepat untuk dimabil adalah dengan cara menerapkan langkah yang selektif, efektif dan juga efisien. Program untuk aspek ini sangat perlu agar terus berjalan secara berkala. (Murdiansyah, 2014 : 77-78)

f. Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam

Yusuf Qaradhawi mengonsep cara pengentasan kemiskinan yang menyangkut pada masyarakat:

- 6) Memberi nafkah kepada karib kerabat
- 7) Menghormati dan menjaga hak tetangga
- 8) Mengeluarkan zakat secara sukarela
- 9) Mengeluarkan berbagai kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti membayar denda, nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan
- 10) Memberikan sedekah sukarela, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat abadi seperti amal jariah, wakaf dan lain-lain.

Dan sarana yang menyangkut negara adalah *Baitul Mal*, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin yang membutuhkan, baik dari kalangan muslim maupun dzimmi. Yusuf

Qaradhawi dalam bukunya *musykilat faqr wa kaifa 'alajaha al-islam* menjelaskan keenam sarana tersebut :

1) Bekerja

Yang dimaksud dengan bekerja menurut Qaradhawi adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau bersama orang lain untuk memproduksi barang atau memberikan jasa. Bekerja semacam inilah inilah yang dimaksud Qaradhawi sebagai senjata pertama untuk memerangi kemiskinan.

2) Jaminan Sanak Famili

Menurut Qaradhawi untuk mengangkat harkat manusia, Islam memiliki syari'at yang orisinal dan jelas yaitu bekerja. Akan tetapi ada beberapa kenyataan manusia-manusia yang tidak mampu bekerja seperti orang yang lemah, anak-anak kecil, orang yang sudah tua renta dan sebagainya. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

3) Zakat

Zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam dan merupakan pilar ketiga dari tiang dan syiar Islam yang agung. Zakat merupakan mengeluarkan harta yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun golongan yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan *asnaf* yang delapan yaitu golongan fakir, golongan miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil.

4) Jaminan Baitul Mal

Baitul Mal yaitu harta milik negara, baik yang berupa harta benda, sarana dan prasarana yang dikendalikan dan menghasilkan jasa pelayanan, maupun perusahaan milik negara, serta sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pajak dan seperlima dari harta rampasan perang.

5) Kewajiban di Luar Zakat

Menurut Qaradhawi merupakan sumber bantuan yang cukup signifikan bagi kaum fakir dan miskin dalam rangka menghapus kemiskinan diantaranya hak tetangga, berkorban pada hari raya kurban, denda karena melanggar sumpah, tebusan zhihar, tebusan bersenggama dengan istri pada siang hari bulan Ramadhan, Fidyah kelompok orang yang tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, denda haji, hak orang miskin dari hasil pertanian ketika panen, kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin.

6) Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan pengikutnya. Ia pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah, dan penyantun. Kepada umatnya ia mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari tuntutan, menghulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. (Wargadinata, 2011 : 55-74)

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Secara konseptual bila negara menggunakan perspektif negara kesejahteraan maka angka kemiskinan akan cenderung menurun. Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera memiliki arti sebagai perasaan sentosa, makmur, aman, serta bebas dari gangguan kewanitaan. Sejahtera juga mengandung arti yang datang dari bahasa sanksekerta yaitu cetera yang berarti orang yang telah sejahtera. Orang sejahtera yang dimaksud adalah orang yang terlepas dari miskin, bodoh, takut, khawatir dan juga telah merasa tenang baik secara lahir dan juga batin.

Dalam peraturan perundang undangan Nomor 13 tahun 1998 yang memuat mengenai makna dari kesejahteraan. Tata kehidupan serta

kehidupan sosial baik dari segi materi dan spiritual yang telah memenuhi aspek keselamatan, ketentraman lahir maupun batin. Tidak hanya itu sejahtera juga diartikan dengan telah terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, sosial, serta dapat mengedepankan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila. (Almizan, 2016 : 72-73)

Badrudin berpendapat bahwa kesejahteraan adalah kondisi kehidupan seseorang dengan kondisi yang melebihi standar kehidupan yang ada di wilayah tertentu. Tidak hanya itu, Abbas juga telah menjelaskan bahwa kesejahteraan sebagai suatu kecukupan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta jiwa dan batin yang bebas dari rasa takut dan khawatir. Tidak hanya itu, kesejahteraan juga merupakan bentuk keadilan yang diterima dalam kehidupannya.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1): “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. (Marini, 2018 : 33)

Maka berdasarkan dari beberapa penjelasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah seseorang telah mampu yang mencukupi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin.

b. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki empat indikator utama, dari empat indikator tersebut adalah sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial.

- 1) Kesejahteraan dapat tercapai apabila telah berpedoman pada nilai dan ajaran Agama Islam dalam hal pembangunan ekonomi di suatu Negara. Sulit untuk dapat mencapai kesejahteraan jika kehidupan perekonomian menentang ajaran Allah. Kesejahteraan dan

keberkahan yang telah di dapat dapat hilang jika menentang ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT

- 2) Untuk meraih kesejahteraan maka kegiatan ekonomi harus terus berjalan dengan maksimal. Dasar dari setiap berjalannya sector perekonomian adalah sector riil yang dapat memberikan kekuatan pada industry perdagangan, hal ini karena sector riil sendiri sangat banyak membutuhkan tenaga kerja serta dapat menjadi inti dari perekonomian syariah.
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Jika kebutuhan dasar suatu masyarakat belum dapat dipenuhi maka belum dapat dikatakan sejahtera. Sama halnya dengan hanya sebagian masyarakat saja yang dapat memenuhi kebutuhannya sementara sebagian lainnya tidak dapat. Kualitas kesejahteraan umat sangat ditentukan oleh distribusi ekonominya.
- 4) Kesejahteraan masyarakat juga diukur dari aman dan tertibnya suatu bangsa. Suatu masyarakat telah sejahtera jika segala macam pemberontakan dan konflik dapat dicegah bahkan dihindari atau paling tidak dikurangi. Kesejahteraan akan mustahil untuk didapatkan jika masyarakat merasa tidak aman dan keselamatan mereka terancam (Arsyianti, 2017 : 28-29)

BKKBN telah menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat untuk tingkat desa ada lima tingkat kesejahteraan yaitu:

- 1) Keluarga Prasejahtera. Adalah setiap rumah tangga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri baik kebutuhan berupa pangan, sandang, dan juga papan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan.
- 2) Keluarga Sejahtera I. mereka adalah keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan dasar minimum, namun belum bisa memenuhi kebutuhan dalam aspek psikologi sosial baik itu pendidikan, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, serta kebutuhan transportasi.

- 3) Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar juga kebutuhan sosial psikologinya, serta telah dapat menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, transportasi dan lain – lain.
- 4) Keluarga Sejahtera III, adalah mereka yang telah dapat memenuhi berbagai jenis kebutuhan baik kebutuhan dasar, pendidikan, tabungan, serta dapat memberikan sumbangan bagi masyarakat yang belum mampu.
- 5) Keluarga Sejahtera III-Plus adalah mereka dengan tingkat perekonomian tinggi serta dapat megambil peran dalam membangun perekonomian suatu bangsa. (Bungkaes, 2013 : 8)

c. Unsur-Unsur Kesejahteraan

1) Unsur Material Kesejahteraan

Kenyataan bahwa setiap individu mengandung aspek fisik yang kemudian memiliki kebutuhan berupa material demi dapat bertahan hidup. Adapun kebutuhan pokok dari setiap individu yaitu seperti kebutuhan pangan, sandang, dan juga kebutuhan papan.

Tidak hanya kebutuhan fisik manusia juga membutuhkan kehidupan sosial yang harus dipenuhi dengan interaksi serta melakukan sosialisasi dengan individu lainnya. Tidak hanya itu, masih ada kebutuhan biologis yang juga perlu untuk dipenuhi. Allah telah menciptakan manusia dalam berpasangan pasangan dimana keduanya saling membutuhkan satu dan lainnya. Oleh sebab itu Negara harus ikut serta dalam menjamin kebutuhan tersebut dengan cara memberikan kehidupan berkeluarga.

2) Unsur Nonmaterial Kesejahteraan

Ada tiga komponen dalam hal system ekonomi Indonesia, seperti:

a) Kebutuhan Spiritual

Salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan adalah pemenuhan kebutuhan spiritual. Maka dari itu, setiap Negara

berkewajiban untuk memberikan saran dan prasarana untuk beribadah bagi masyarakatnya agar dapat menjalankan ajaran agamanya dengan benar, serta menjamin perlindungan dan juga kebebasan untuk memeluk ajaran yang dipercayai.

b) Keamanan Jiwa/Kehidupan

Untuk menjamin jiwa dan kehidupannya maka aspek keamanan dan keselamatan sangat perlu untuk dipenuhi. Maka dapat dikatakan bahwa jaminan keamanan bagi setiap manusia adalah suatu kebutuhan dasar. Kehidupan yang aman dan perasaan aman menjadi awal dari suatu kemajuan dan peradaban manusia menjadi lebih baik. Untuk mengembangkan dan terus memperbaiki diri yang kemudian akan menghasilkan peradaban yang maju. Jika dilihat dari segi ekonomi maka keamanan jiwa dan juga harta adalah salah satu syarat untuk pembangunan ekonomi menuju lebih sejahtera.

c) Kemurnian dan Kesempurnaan Akal

Berdasarkan pada sila tentang kemanusiaan, diberkahi dengan akal adalah salah satu perbedaan manusia dengan binatang. Manusia lebih dimuliakan karena diberkahi akal. Manusia akan rusak jika akal yang dimilikinya telah rusak. Maka sangat penting untuk menjaga akal yang merupakan salah satu kebutuhan manusia.

3) Dimensi Waktu dari Kesejahteraan

Suatu Negara dapat terus eksis jika kesejahteraan masyarakat telah terjamin. Kesejahteraan ini tidak hanya dalam jangka waktu pendek saja, namun juga kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang. Jika dilihat dari kesejahteraan dalam jangka panjang maka perlu dilakukan eksploitasi secara besar dan maksimal atas sumber daya ekonomi yang ada. Namun hal ini kadang dapat berdampak negative dari perkembangan ekonomi itu sendiri

dimasa yang akan datang. Ada dua perspektif dari system ekonomi di Indonesia, yaitu:

- a) Hidup sejahtera di dunia dan juga akhirat
- b) Mensejahterakan generasi saat ini dan juga generasi kedepannya (Ismail, 2014 : 62-65)

d. Faktor Lain yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan

1) Komposisi Umur Penduduk

Negara berkembang memiliki porsi jumlah penduduk yang masih dibawah umur dan orang yang diusia muda lebih banyak dibandingkan dengan Negara maju. Maka dari itu, perbandingan tingkat pendapatan setiap keluarga pada dua Negara tersebut tidak sama dengan perbandingan pendapat per kapita.

2) Distribusi Pendapatan Masyarakat

Kesejahteraan juga dapat dilihat dari distribusi pendapat masyarakat. Hal ini dilihat dengan cara melakukan perbandingan tingkat kesejahteraan dengan perubahan dari waktu ke waktu, apabila menggunakan indeks per kapita.

3) Pola Pengeluaran Masyarakat

Setiap Negara memiliki pola pengeluaran yang berbeda, hingga menyebabkan dua Negara dengan pendapatan per kapita sama namun bisa jadi memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda. Iklim yang berbeda untuk setiap Negara akan menyebabkan pengeluaran setiap Negara akan berbeda pula. Masyarakat di negera maju biasanya akan mengeluarkan lebih banyak uang demi mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang sama dengan Negara berkembang.

4) Komposisi Pendapatan Nasional

Jika dilihat pada dua Negara yang memiliki pendapatan per kapita yang sama namun produksi nasional nya berbeda maka tingkat kesejahteraanya dapat berbeda pula. Dua masyarakat dengan pendapatan perkapita yang sama, tingkat kesejahteraannya akan

sangat berbeda apabila komposisi produksi nasionalnya sangat berlainan.

5) Perbedaan Masa Lapang

Pendapatan perkapita yang berbeda dapat menjadi alasan bahwa Negara dengan pendapatan per kapita sama namun berbeda dalam tingkat pendapatan.

6) Keadaan Pengangguran

Tingkat pertumbuhan per kapita dapat menentukan atau menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Tidak hanya menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja adalah salah satu tujuan pembangunan ekonomi. (Sukirno, 2007 : 58-60)

e. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan menurut Islam yaitu setiap orang yang dinilai memiliki rezeki yang cukup serta rezeki tersebut datang dari cara yang halal. Dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya termasuk kebutuhan spiritual serta merasa qona'ah atas rezeki yang didapatnya. Sedangkan banyak ahli dan para musafir yang mendefinisikan kesejahteraan secara Islam yaitu dapat memenuhi kebutuhan fisik dari rezeki yang didapat secara halal, memiliki keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, penuh rasa cinta kasih sesama, riba dan qana'ah atas apa yang telah dititipkan Allah padanya dan juga bahagia dalam menjalani hidup. Maka dari itu berikut ini adalah: *Ad-Dien* : Telah melaksanakan rukun Islam yang lima (syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji).

- 1) *An-Nafs* : dapat memenuhi kebutuhan serta bebas dari ancaman yang datang
- 2) *Al-Aql* : dapat memenuhi kebutuhan untuk fasilitas pendidikan bagi setiap anggota keluarga
- 3) *An-Nasl* : dapat memenuhi keturunan dengan baik tanpa berbuat maksiat

- 4) *Al-Maal* : dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya.

Zadjuli telah mengemukakan bahwa indikator dari sejahtera yang berlandaskan pada ajaran Al-Qu'ar yaitu:

- 1) Menerapkan setiap nilai dan norma sesuai dengan ajaran Islam (*hifzuddien*) saat mengerjakan segala hal demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah penuh ketentraman dan ketenangan (*hifzunnabal*).
- 2) Berusaha untuk teru menanamkan nilai untuk menjaga rumah tangga dari keselamatan jiwa
- 3) Menegakkan norma yang menjamin pemikiran manusia jenius (*hifz'aql*). Hal ini terlihat dengan kewajiban menuntut ilmu dapat terpenuhi
- 4) Membangun norma yang dapat menjamin perekonomian yang saling memberi keuntungan (*hifz-mall*). Hal ini dapat dilihat dengan kubuthan rumah tangga yang dapat terpenuhi.
- 5) Membangun norma dengan perilaku yang santun memiliki moral yang bagus dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan perbuatan saling tolong menolong. (Hulaimi, 2017 : 23-24)

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian PKH dan Dasar Hukum PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu kebijakan dari pemerintah dalam rangka menekan angka kemiskinan di Indonesia. Program PKH dijalankan dengan memberikan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Keuangan, 2015 : 5)

Berikut ini adalah hukum yang melandasi Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

- 1) Tentang system jaminan sosial nasional yang diatur dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2004
- 2) Tentang penanganan fakir miskin diatur dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2011
- 3) Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diatur dalam Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010
- 4) Peraturan tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan diatur dalam Inpres nomor 3 Tahun 2010
- 5) Peraturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Inpres nomor 1 Tahun 2013
- 6) Peraturan tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan tahun 2009 diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Direktur Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor BJS/85/05/04/V/2009

Dasar pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007,
- 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008,
- 3) Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD",
- 4) Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD" dan Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan. (Suwinta, 2016 : 3)

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan dari program PKH yaitu :

- 1) Dengan diberikannya akses pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial diharapkan taraf hidup keluarga penerima bantuan PKH dapat meningkat
- 2) Membantu keluarga miskin untuk meringankan beban dan meningkatkan pendapatannya
- 3) Membina keluarga miskin agar dapat menciptakan perilaku mandiri untuk mendapatkan akses kesehatan dan kesejahteraan lainnya
- 4) Menekan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial
- 5) Memperkenalkan manfaat dari penggunaan produk PKH (Hikmat, 2018 : 25-26)

c. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. (Hikmat, 2018 : 26)

d. Kriteria Komponen Program Keluarga Harapan

- 1) Untuk komponen kesehatan, berikut ini adalah kriterianya:
 - a) Ibu dalam keadaan hamil/menyusui
 - b) Anak dengan umur mulia dari nol hingga enam tahun
- 2) Untuk komponen pendidikan berikut ini adalah beberapa kriterianya:
 - a) Anak yang masih duduk dibangku SD/MI atau sederajat
 - b) Anak yang masih duduk di banku SMP/MTs atau sederajat
 - c) Anak yang masih duduk dibangku SMA/MA atau sederajat
 - d) Anak yang masih berusia enam sampai dengan dua puluh satu tahun atau yang belum selesai dengan pendidikan wajib belajar dua belas tahun
- 3) Untuk komponen kesejahteraan sosial berikut ini adalah beberapa kriterianya:

- a) Individu dengan umur diatas enam puluh tahun
- b) Individu penyandang disabilitas berat (Hikmat, 2018 : 26-27)

e. Hak dan Kewajiban PKH

- 1) Hak penerima bantuan PKH yaitu:
 - a) Menerima fasilitas bantuan berupa uang tunai
 - b) Menerima akses kemudahan untuk fasilitas kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku
 - c) Menerima akses fasilitas pendidikan bagi anak yang masih harus menyelesaikan usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berdasarkan peraturan yang ada
- 2) Kewajiban penerima program adalah :
 - a) Peserta PKH wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Persyaratan Kesehatan bagi anak
 - (a) Anak dengan umur nol hingga dua puluh delapan hari harus diperiksa kesehatannya minimal sejumlah 3 kali
 - (b) Anak dengan umur nol hingga sebelas bulan harus melakukan iminisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, campak, Hepatitis B) serta timbang berat badan dengan rutin pada setiap bulannya
 - (c) Anak dengan umur enam hingga sebelas bulan harus mendapatkan Vitamin A paling tidak dua kali setahun yaitu bulan Februari dan Agustus
 - (d) Anak dengan umur dua belas hingga lima puluh Sembilan bulan harus diimunisasi tambahan serta berat badannya ditimbang secara rutin setiap sekali dalam tiga bulan. Anak harus terus dipantau perkembangannya dan mendapatkan fasilitas pendidikan usia dini apabila diwilayah tersebut menyediakan posyandu atau PAUD

(2) Untuk komponen kesehatan ibu hamil berikut ini adalah beberapa kriterianya, yaitu:

- (a) Ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan minimal empat kali yakni saat usia kandungan tiga bulan pertama, tiga bulan kedua, tiga bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe
- (b) Proses melahirkan harus dibantu oleh tenaga kesehatan yang professional
- (c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehata paling tidak tiga kali pada minggu pertama, keempat, keenam setelah proses lahiran

b) Untuk penerima komponen pendidikan berikut ini adalah beberap persyaratan yang harus di penuhi:

Peserta PKH harus memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan kehadiran saat disekolah sebanyak minimal 85% hari sekolah selama sebulan dalam setiap tahun ajaran dengan catatan seperti di bawah ini:

- (1) Peserta PKH mempunyai anak dengan usia tujuh hingga lima belas tahun wajib untuk mendaftarkan diri ke lembaga pendidikan dasar seperti SD/ MI/ SDLB/ Salafiyah Ula/ Paket A atau SMP/ MTs/ SMLB/ Salafiyah Wustha/ Paket B termasuk SMP/MTs terbuka serta ikut kelas minimal 85%. Jika anak berumur lima hingga enam tahun maka harus membayar uang pendidikan sendiri.
- (2) Bagi anak dengan disabilitas namun masih bisa mengikuti pendidikan normal seperti SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler dapat mengikuti program SDLB atau SMLB.
- (3) Peserta PKH yang mempunyai anak dengan umur lima belas tahun hingga delapan belas tahun dan belum selesai

dengan pendidikan dasar, maka harus mendaftarkan diri kembali ke pendidikan dasar seperti pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A atau Paket B).

- (4) Anak penerima bantuan PKH yang bekerja atau menjadi pekerja di bawah umur maka harus ikut program remedial dan kembali mempersiapkan pendidikannya
- (5) Bila kedua di atas, kesehatan dan pendidikan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka akan memperoleh bantuan secara teratur. (Keuangan, 2015 : 7-9)

f. Program Bantuan Komplementer

Seluruh KPM PKH memiliki hak untuk memperoleh program bantuan yang sifatnya komplementer baik dalam hal kesehatan, subsidi energy, perumahan, ekonomi, serta bidang pendidikan. Berikut ini adalah beberapa program yang telah dijalankan oleh pemerintah:

1) Jaminan Kesehatan Nasional

Seluruh KPM PKH juga merupakan penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan demikian peserta KIS telah dijamin dan dipastikan akan mendapatkan akses kesehatan sebagaimana yang telah dijamin dalam Kesehatan Nasional (JKN) dan program ini dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

Tidak hanya itu, program ini juga secara bertahap akan dilakukan perluasan bagi masyarakat disabilitas kesejahteraan sosial serta bagi bayi yang lahir sebagai penerima bantuan iuran (PBI) yang selama ini belum dijamin oleh pemerintah. Berikut ini adalah kriteria dari peserta PBI yaitu:

- a) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI). Jaminan Kesehatan yang diberikan merupakan jaminan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengikuti program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan

- b) Yang dikatakan fakir miskin yaitu setiap individu yang tidak memiliki sumber mata pencarian atau sumber pendapatan sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak mampu memberikan oemenuhan pada kebutuhan dasar anggota keluarganya.
- c) Yang tergolong orang tidak mampu yaitu setiap individu yang sumber pendapatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, namun tidak sanggup memenuhi kebutuhan dan iuran untuk anggota keluarganya.

Berikut ini adalah beberapa ciri atau kriteria yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu berdasarkan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 adalah Rumah Tangga yang:

- a) Keluarga yang sama sekali tidak memiliki sumber pendapatan atau jika memiliki hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan seharai-hari saja
- b) Pendapatan dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan pokok dengansangat biasa dan sederhana
- c) Kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan kecuali untuk mengakses puskesmas yang disubsidi pemerintah saja.
- d) Tidak memiliki kemampuan untuk membelikan setiap anggota keluarga satu pakaian dalam satu tahun
- e) Hanya mampu untuk mengirimkan anak sekolah hingga tingkat SMP saja
- f) Hanya memiliki rumah yang terbuat dari kayu, walaupun dari tembok dengan kondisi yang sudah sangat tidak layak, termasuk di dalamnya tembok yang berlumut, belum diplaster maupun tembok yang sudah sangat usang
- g) Lantai rumah yang hanya terbuat dari tanah atau pun semen dan keramik dengan kondisi sangat buruk
- h) Atap rumah yang hanay terbuat dari rumbia, ijuk, genteng yang sudah tidak layak

- i) Listrik di rumah yang tidak dari meteran sendiri
- j) Luas lantai rumah yang tidak lebih dari 8 m² untuk setiap orang
- k) Sumber mata air yang digunakan di dalam rumah bukan mata air yang bersih dan terlindungi seperti air hujan ataupun air sungai (Hikmat, 2018 : 29-30)

2) Bansos Rastra

Semua masyarakat yang menerima bantuan PKH memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial beras sejahtera (Rastra). Hal ini bertujuan agar kebutuhan pangan rumah tangga miskin dapat terpenuhi dengan baik. Beras ini akan diberikan sejumlah 10 kg setiap bulannya. Berikut ini adalah ketentuan bagi setiap masyarakat yang berhak menerima Rastra, yaitu:

- a) Rumah tangga yang kondisi ekonominya termasuk kedalam 25% tingkat perekonomian terendah di suatu wilayah. Dengan demikian akan dikatakan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra namun namanya tidak termasuk pada Daftar KPM dan telah ditentukan oleh Menteri Sosial.
- b) Sumber data KPM Bansos Rastra yaitu berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, yang kemudian dikatakan sebagai DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.
- c) DT-PPFM akan dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Yang setelah itu disebut sebagai Pokja Data yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017.
- d) Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra telah ditegaskan oleh oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c.q. Tim Koordinasi

Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG.

Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan, Daftar KPM Bansos Rastra hendaknya mengandung informasi seperti di bawah ini:

- (1) Nama pasangan dalam sebuah keluarga
- (2) Nama Kepala Keluarga
- (3) Nama Anggota Keluarga Lainnya
- (4) Alamat Tinggal Keluarga
- (5) Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM

3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah suatu program pemerintah yang memberikan metode dengan cara menyalurkan bantuan yang tidak berupa uang tunai. Dengan cara meperlihat kartu kombo elektronik penerima berhak untuk mendapatkan bantuan pangan seperti telur dan beras. Berikut ini adalah beberapa ketentuan untuk mendapatkan BPNT yaitu:

- a) Rumah tangga yang kondisi ekonominya termasuk 25% perekonomian terendah di wilayahnya. Mereka kemudian akan dikatakan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Namnya akan dimasukkan ke dalam daftar KPM dan akan disahkan oleh Menteri Sosial.
- b) Sumber data KPM BPNT adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.
- c) DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial

No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

d) Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- (1) Nama Pasangan Kepala Keluarga (calon pemilik rekening)
- (2) Nama Kepala Keluarga
- (3) Nama Anggota Keluarga Lainnya
- (4) Alamat Tinggal Keluarga
- (5) Nomor Induk Kependudukan (NIK) jika ada
- (6) Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM
- (7) Nama gadis ibu kandung
- (8) Nomor peserta PKH

4) Program Indonesia Pintar (PIP)

KPM PKH yang berusia antara enam sampai dengan dua puluh satu tahun memiliki hak untuk menerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar, hal ini dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Memberikan akses kepada anak yang berusia enam hingga dua puluh satu tahun untuk mendapatkan fasilitas pendidikan hingga ke jenjang program wajib belajar dua belas tahun
- b) Mengurangi angka putus sekolah akibat putus sekolah (*drop out*) ataupun menurunkan angka putus sekolah karena alasan ekonomi
- c) Meningkatkan minat siswa yang semula telah putus sekolah untuk kembali bersekolah ataupun untuk mengikuti program pelatihan kemampuan tertentu

Berikut ini adalah beberapa target dari penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar, yaitu:

- a) Penerimaannya adalah siswa dari keluarga miskin 2014 serta memegang KKS yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- b) Siswa dari keluarga yang memiliki KKS dan tidak mendapatkan bantuan BSM 2014
- c) Siswa/anak dari keluarga KPM PKH non KKS
- d) Siswa yang tidak memiliki orang tua atau dengan status yatim maupun piatu atau siswa yang berasal dari panti asuhan
- e) Anak berasal dari kelaurag yang terpidana atau anak yang pernah berada si LAPAS
- f) Siswa yang berasal dari SMK dan pernah mengikuti studi keahlian pada beberapa bidang tertentu seperti pertanian, agrobisnis, kehutanan, pelayaran, dan sebagainya.

Siswa/anak yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Siswa Pendidikan Formal:
 - (1) Masih terdaftar pada suatu sekolah
 - (2) Terdaftar dalam Dapodik sekolah
 - (3) Sekolah mengusulkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud
- b) Anak Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal:
 - (1) Masih terdaftar pada suatu lembaga kursus atau program keahlian kusus
 - (2) Lembaga pelatihan atau kursus mengusulkan pada idinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud
- c) Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah:
 - (1) Kembali mendaftarkan diri pada sekolah ataupun lembaga kursus tertentu

(2) Lembaga kursus ataupun sekolah mengusulkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud.

5) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah suatu program yang dijalankan dengan cara membentuk sekelompok masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan pembinaan dari pemerintah. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang ikut serta dalam program dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga secara berkelanjutan.

2) Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)

Rutilahu merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan pada masyarakat miskin berupa bantuan perbaikan rumah agar fasilitas tempat tinggal yang layak dapat direalisasikan

3) Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut)

Aslut adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk masyarakat yang berusia lanjut. Bantuan ini diberikan berupa uang tunai kepada yang berusia enam puluh tahun keatas untuk menunjang kesejahteraan sosial.

4) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)

ASPDB adalah salah satu program pemerintah untuk memberikan uang tunai serta pendampingan bagi masyarakat yang mengalami disabilitas berat. Bantuan yang diberikan adalah bantuan sosial untuk komponen kesejahteraan sosial. Bantuan Sosial Lainnya

5) Sertifikat Kepemilikan Tanah (Badan Pertanahan Nasional)

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga telah mengambil langkah untuk kesejahteraan rakyat miskin dengan program pendaftaran sertifikat tanah yang gratis. Adapaun nama program ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). (Hikmat, 2018 : 31-35)

g. Peran PKH dalam Pengentasan Kemiskinan

Pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan juga Pasal 34 ayat 2 telah dijelaskan bahwa pemerintah wajib mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan bahwa jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin, serta pemerintah berkewajiban untuk mempersiapkan fasilitas baik fasilitas kesehatan maupun fasilitas umum lainnya. Pasal tersebut dengan tegas menjelaskan setiap kewajiban dari Negara kepada masyarakat miskin.

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah banyak menjalankan berbagai program dan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, pemerintah Indonesia telah menjelaskan setiap kebijakan serta program yang telah disusun untuk menekan angka kemiskinan menjadi tiga kelompok, yakni:

- 1) Kelompok dengan kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kebijakan tersebut berbentuk suatu program yang didalamnya termasuk bidang pendidikan, akses kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, kebersihan, dan akses air bersih. Program ini akan dijalankan dengan metode langsung serta manfaat dari program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat penerima. Masyarakat yang ditargetkan menerima bantuan ini adalah golongan Keluarga Sangat Miskin (KSM).
- 2) Kebijakan dengan model memberdayakan menggunakan pendekatan partisipatif. Program ini akan dilaksanakan dengan cara berkelompok dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (Habibah, 2020 : 254-255)

B. Penelitian Yang Relevan

Untuk melengkapi literature dan referensi yang sebelumnya telah dijelaskan, peneliti juga menelaah beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa ringkasan dari penelitian tersebut:

1. Sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu” oleh Aprilia Saraswati 2018. Temuan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki pengaruh yang positif pada tingkat kemiskinan dan kurang mampu di wilayah Kabupaten Pringsewu. Jika dibahas berdasarkan ilmu-ilmu Syariah dan Ekonomi Islam seperti keadilan, tanggung jawab dan *takaful*, maka penerapan PKH hanya sebatas jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Padahal nilai keadilan dan tanggung jawab sangat perlu untuk kembali dievaluasi dan dioptimalkan agar program PKH dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. sebuah penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam” oleh Desi Pratiwi, 2020. Temuan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa program PKH yang dijalankan oleh pemerintah belum menunjukkan pengaruh yang signifikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kedaton I. Meskipun demikian, program ini banyak membantu Rumah Tangga Miskin dalam hal memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Tidak hanya itu, program ini juga telah banyak membantu masyarakat miskin dalam hal pendidikan, kesehatan, meringkan beban lansia yang berusia di atas tujuh puluh tahun serta masyarakat disabilitas berat. Dalam penelitian juga disebutkan bahwa program PKH belum tepat sasaran,

hal ini terjadi karena rentang waktu anatar pengusulan penerima PKH dengan realisasi bantuan yang diberikan cukup lama. Pada saat pengusulan penerima suatu keluarga masih tergolong miskin, namun pada saat program direalisasikan mereka telah berkembang dan mengalami peningkatan pada jumlah pendapatannya. Oleh sebab itulah program PKH dikatakan belum tepat sasaran.

3. Sebuah penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” oleh Shella Yulia Rosalina, 2018. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan PKH untuk mencapai penurunan jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yaitu: a) Target calon penerima bantuan program PKH b) Target lokasi bagi penerima bantuan program PKH. c) Pertemuan awal dengan calon penerima dan dilakukan validasi d) melakukan penyaluran dana bantuan e) Membentuk kelompok peserta penerima bantuan program PKH f) Memverifikasi komitmen dari penerima bantuan. g) Penangguhan dan pembatalan. h) Pemutakhiran data. i) Pengaduan peserta PKH. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan melibatkan suatu individu ataupun kelompok masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa program PKH yang dijalankan jika dilihat dari perspektif tujuan awal serta pembinaan yang dilakukan serta peyuluhan Islam telah sesuai. Tidak hanya itu, dapat disimpulkan bahwa program PKH yang dijalankan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang telah terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan walaupun target pencapaian belum sepenuhnya optimal.
4. Penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Eny Kusumawati, 2019. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program PKH yang dapat diukur dengan beberapa indikator seperti, tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna, dan tepat sasaran. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa semua indikator tersebut telah terpenuhi. Meskipun demikian program PKH Desa Soko belum diberikan secara rata. Hal disebabkan karena kuota penerima program PKH yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin di Desa Soko. Program PKH yang dijalankan telah menurunkan angka kemiskinan serta telah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, membantu dalam hal pendidikan, serta membantu dalam hal kesehatan.

5. Penelitian yang berjudul “Peranan Program Keluarga Harapan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai” oleh Akhyaruddin Purba, 2019. Temuan dari penelitian mengemukakan bahwa Program PKH yang sejauh ini telah berjalan telah berperan besar dalam hal pendidikan bagi keluarga kurang mampu seperti membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga anak tidak perlu bekerja setelah pulang sekolah. Sedangkan dalam hal kesehatan, bagi masyarakat penerima program PKH terutama bagi keluarga yang memiliki balita dan juga bayi diberikan akses kesehatan agar dapat dengan rutin memeriksakan bayi atau balitanya. Meskipun demikian, bagi masyarakat yang tidak sedang hamil, atau memiliki bayi dan balita belum dapat menerima fasilitas dari program ini. oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa program PKH belum mengambil peran yang begitu besar. Sedangkan untuk peran meningkatkan pendapat dalam suatu rumah tangga bantuan PHK baru diberikan dalam bentuk uang tunai saja, karena ada program KUBE yang telah berjalan di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode yang digunakan adalah metode jenis deskriptif kualitatif. Penelitian yang menyajikan data dan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata disebut juga dengan penelitian kualitatif. Pada hasil penelitian akan dijelaskan secara ilmiah tentang suatu permasalahan atau fenomena dengan menggunakan beberapa metode yang ditentukan. Erickson berpendapat bahwa penelitian kualitatif akan menggambarkan segala kegiatan dengan naratif dan menjelaskan efek atau pengaruh dari hal tersebut terhadap kehidupan suatu masyarakat. (Setiawan, 2018 : 7)

Untuk melakukan analisa tentang peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di nagari Balimbing maka pendekatan kualitatif akan digunakan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penulis memulai kegiatan penelitian bulan Januari 2021 dan ditargetkan selesai sampai dengan Juni 2021. Adapun tempat penelitian yang dilakukan di Nagari Balimbing.

**Tabel 3. 1
Jadwal Kegiatan Penelitian**

Uraian	Tahun 2020-2021					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Pengajuan Proposal						
Bimbingan Proposal						
Seminar Proposal						
Revisi Setelah Seminar Proposal						
Penelitian						
Bimbingan Skripsi						
Munqasyah						

Sumber: Data diolah sendiri

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif yang akan menjadi insytrumen dari pnelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Maka peneliti sangat dituntut untuk benar-benar memahami permasalahan penelitian agar data yang didapatkan maksimal. Sedangkan instrument pendukung yang digunakan adalah panduan wawanacara yang memuat berbagai daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah keterangan mengenai objek yang diteliti. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder :

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut yaitu data yang langsung dari Pendamping PKH Nagari Balimbing dan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Termasuk juga segala jenis data yng erat kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data yang didapatkan dari pihak kedua yang terlibat dalam penelitian ini seperti data dari dokumentasi di kantor Wali Nagari Balimbing, situs Badan Pusat Statistika (BPS) maupun jurnal yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Suatu teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian disebut juga dengan teknik pengumpulan data. Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini, observasi non partisipan adalah jenis

observasi yang digunakan. Peneliti tidak secara langsung terlibat pada suatu kegiatan di dalam sebuah kelompok, atau sederhananya, peneliti tidak ikut bergabung pada suatu kegiatan yang sedang ia amati (yusuf, 2014 : 384). Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan tentang peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing.

2. Wawancara

Teknik wawancara biasanya banyak dipakai jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk melihat permasalahan dan fenomena yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Tidak hanya itu, jika peneliti menginginkan informasi secara lebih dalam, juga bisa dilakukan dengan teknik wawancara yang dilengkapi dengan panduan dan struktur wawancara. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih dalam maka wawancara terstruktur dapat dilakukan. (Sugiyono, 2018 : 316-318)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah melakukan pengumpulan data pada masa yang lewat. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, serta karya lainnya baik berbentuk tulisan maupun berbentuk media elektronik (Sugiyono, 2018 : 326). Sangat banyak data dan fakta yang sebenarnya tersimpan dalam bentuk terdokumentasi, baik dokumentasi dengan wujud surat, laporan, serta foto dan gambar. (Noor, 2011 : 141)

Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan sejumlah dokumentasi dengan bentuk foto, catatan, serta arsip penting lainnya yang erat kaitannya dengan fenomena dan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, khususnya tentang peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing.

F. Teknik Analisis Data

Suatu cara atau langkah yang dilakukan untuk melakukan analisa pada data yang telah diperoleh dalam suatu penelitian. Dalam hal ini alat statistik atau metode statistik yang berhubungan akan digunakan untuk mempermudah

peneliti dalam hal analisa (Noor, 2011 : 163). Maka dari itu, tahapan awal dalam hal menganalisis data adalah proses reduksi kemudian barulah data disajikan dan didisplay lalu diambil kesimpulannya dan proses verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data memiliki arti menarik hal penting dan merangkum data serta fokus pada data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian saja. Kemudian akan ditemukan tema serta polanya, sedangkan yang tidak berhubungan akan dibuang. Salah satu cara untuk melakukan reduksi adalah abstraksi. Maka dengan demikian, proses reduksi akan dilakukan secara terus menerus selama penelitian masih dilakukan hingga pada akhirnya peneliti akan menghasilkan catatan kecil yang berisi rangkuman dari permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dan yang akan direduksi didapatkan dengan cara melakukan wawancara pada beberapa pihak terkait seperti pemerintah Nagari Balimbing dan pihak lainnya.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penyajian data yaitu sesuatu yang memuat beberapa informasi yang disusun secara sistematis yang akan memberikan kesempatan untuk ditarik kesimpulannya. Jika metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif maka data yang disajikan akan berbentuk narasi yang perlu disederhanakan tanpa mengurangi isi dan maksud dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir pada sebuah proses penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan suatu makna dari data yang telah diperoleh dengan cara menghubungkan, membandingkan, serta mencari persamaan dan perbedaan. Kesimpulan dapat ditarik dengan cara melakukan perbandingan pada kesesuaian informasi yang disampaikan oleh satu informan dengan informan lainnya. (Sodik, 2015 : 99-100)

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil langkah untuk melakukan wawancara serta pengamatan di lapangan. Jika data dari hasil wawancara dan juga pengamatan telah didapatkan maka selanjutnya data akan dikategorikan sesuai dengan tema dan permasalahan atau fenomena yang dibahas pada penelitian ini. Hasil yang telah disimpulkan ini akan memuat informasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk melakukan pengujian dan keabsahan data maka perlu dilakukan teknik triangulasi. Sugiyono berpendapat bahwa triangulasi adalah suatu teknik untuk menguji kredibilitas data yang telah dikumpulkan. Kredibilitas dapat diartikan sebagai sumber yang didapatkan, cara mendapatkan, serta waktu didapaknya data tersebut. Maka dari itu, ada beberapa jenis dari triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengambilan data, triangulasi waktu. Pada penelitian ini triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan juga triangulasi waktu. Proses triangulasi ini dilakukan secara berkelanjutan dan selama proses pengumpulan data hingga data yang diperoleh dapat diyakini tidak lagi berbeda serta segala informasi telah berhasil didapatkan dari berbagai informan. Setelah itu, data akan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan pada informan. Barulah kemudian data akan diaudit, dilakukan analisa dan kemudian diartikan, diterjemahkan dan disajikan atau dilaporkan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Nagari Balimbing

Ninik moyang masyarakat di kenagarian Balimbing berasal dari puncak gunung Merapi yang turun ke Pariangan dan terus ke Batu Basa, Galogandang. Dari Galogandang turun ke Bukit Taratai. Di Jorong Balimbing ada 16 ninik mamak atau orang 4 jinih. Dari 16 ninik mamak yang ada masing-masing berpencar, diantaranya ada yang pergi ke Bukit Taratai yaitu Dt. Kayo, Dt. Rajo Mangkuto dan Dt. Tumanggung, ada yang pergi ke Puncak Kampai di ujung Bukit Taratai diantaranya Dt. Cahayo Lipati, Dt. Gadang, Dt. Tan Majo Lelo, dan Dt. Maharajo Kayo Di talago pulutan, ada yang pergi ke mejan-mejan di daerah arah ke Ombilin Dt. Tumangkuto, Dt. Sinaro Nan Putihah (berasal dari sandi mandah), Dt. Marajo (Daerah Sumbu Kuniang), Kemudian Dt. Tunaro dan Dt. Rajo Batuah (di daerah guguk Simantuin) dan Dt. Tan Palawan (Daerah Bayang Tungga). Kemudian di Simabur Dt. Marajo Dirajo ,dikubang tanjung Dt. Gamuak di balai panjang daerah arah ke ombilin dan Dt. Rajo Malano daerah Padang Sarai.

Setelah berpencar ke daerah-daerah, kemudian berkumpullah di Koto Tuo (yang sekarang sudah menjadi persawahan), maka timbul suatu inisiatif untuk membentuk suatu nagari, disitu direncanakan pembentukan suatu Nagari dan harus mempunyai empat syarat supaya terbentuknya suatu Nagari, diantaranya adalah:

a. Rumah Adat

Disusun rumah adat atau rumah gadang seperti yang ada sekarang termasuk rumah tuo Kampai Nan Panjang

b. Masjid

Masjid di bangun di lakuk api-api

c. Balai Adat

Tempat pertemuan (dulu di Bukit Percaturan) semacam balai adat

d. Labuh (jalan) dan Tapian(Lapangan Permainan)

Dan hasil pertemuan Ninik Mamak Kinawai dan balimbing di umumkan di Bukit Bunian. Kemudian seiring perkembangan waktu diadakanlah pertemuan di Bukit Percaturan guna melakukan musyawarah untuk mendirikan sebuah Nagari yang dihadiri oleh 56 orang dari daerah masing-masing diantaranya hadir 12 orang perwakilan dari Balimbing, 12 orang perwakilan dari Kinawai, 12 orang perwakilan dari Sawah Kareh, 12 orang perwakilan dari Bukittamasu, 8 orang perwakilan dari Padang Pulai. Setelah melakukan musyawarah di bukit percaturan diperoleh lah hasil musyawarah diantaranya :

- a. 3 Suku jatuh ke kinawai, tiga suku jatuh ke balimbing dan 1 tanjung.
- b. Untuk menetapkan nama Nagari berasal dari sebuah teka teki yang terjadi di daerah Koto Tuo, tepatnya di lurah (batang air) Sumalik dekat perkampungan Koto Gadang, terjadilah teka teki disana antara 2 orang ninik moyang, salah seorang diantaranya mengatakan kepada kawannya, coba kamu ambil buah yang ada di batang kayu itu, setelah diambil dan dicoba makan rasanya masam, ini adalah pohon Balimbing. Maka yang satu lagi diambil kawan yang kedua dan dimakan dan rasanya pahit, ini adalah pohon Kina lalu yang pahit itu dibuanglah ke batang air dan itulah nama batang air/lurah batang Kinawai, yang masam tadi ditinggal dan dijadikan tempat tersebut bernama Balimbing, makanya Balimbing dan Kinawai itu tidak dapat dipisahkan dengan status adatnya satu.

2. Visi Dan Misi Nagari Balimbing

a. Visi Nagari Balimbing

Visi Nagari balimbing tahun 2017-2023 sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Nagari Balimbing Yang Madani, Aman Dan Transparan, Yang Berlandaskan Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah”.

b. Misi Nagari Balimbing

Misi Nagari Balimbing tahun 2017-2023 sebagai berikut :

- 1) Menerapkan syariat dan ajaran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat serta berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah serta membudayakan kehidupan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi nagari, BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) yang menjadi program pemerintah dalam mewujudkan Nagari yang mandiri.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan penerapan pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
- 5) Mewujudkan pemerintahan nagari yang kuat, transparan, bersih dan bertanggung jawab (akomodatif, partisipatif dan komunikatif).
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang olahraga dan budaya bagi anak nagari.
- 7) Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan bersih.
- 8) Meningkatkan informasi publik berbasis teknologi dengan menciptakan areal pendukung internet yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat, generasi muda, dan menjalin komunikasi yang lebih komunikatif dengan perantau guna untuk kemajuan Nagari Balimbing.
- 10) Menggali potensi alam, ekonomi, dan potensi pertanian yang dapat dijadikan komoditi unggulan sebagai wujud menghasilkan Produk Usaha Milik Nagari.

11) Membuat Peraturan Nagari untuk mengayomi masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kondisi Geografis

Nagari Balimbing merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Rambatan. Nagari ini berbatasan langsung dengan nagari Rambatan di sebelah Utaranya, berbatasan dengan nagari Tigo Koto di sebelah baratnya, nagari Simawang dan Kabupaten Solok di sebelah selatannya serta Kecamatan Tanjung Emas di sebelah Timurnya karena terletak di dataran yang cukup tinggi maka nagari ini memiliki cuaca yang dingin dengan suhu yang rendah. Ketinggian nagari ini adalah diantara \pm 450-500 meter diatas permukaan laut (DPL). Beberapa daerah di wilayah ini dikelilingi oleh perbukitan dengan bentang alam atau morfologi yang unik, sehingga Nagari Balimbing dikelilingi oleh perbukitan.

Nagari Balimbing terdiri dari lima Jorong yang dipengaruhi oleh kondisi topografinya yang berbukit dan berlembah, sehingga Nagari Balimbing beriklim sedang dengan temperatur bervariasi antara 20° - 30° C. Dengan curah hujan 1.500-2.000 mm.

Batas antar jorong yang tergabung dalam Kenagarian Balimbing ditandai dengan batas alam seperti sungai, sawah dan perbukitan. Jorong yang tergabung dalam Kenagarian Balimbing antara lain :

- a. Jorong Bukit Tamasu, dengan luas \pm 150,59 ha.
- b. Jorong Sawah Kareh, dengan luas \pm 440,42 ha.
- c. Jorong Kinawai, dengan luas \pm 844,09 ha.
- d. Jorong Padang Pulai, dengan luas \pm 149,39 ha.
- e. Jorong Balimbing, dengan luas \pm 837,51 ha.

Kenagarian Balimbing berdasarkan hasil dari pengukuran dengan menggunakan GPS memiliki luas \pm 2.422 Ha. Adapun yang menjadi pusat pemerintahan dalam Kenagarian Balimbing terdapat di Jorong Kinawai.

4. Kondisi Topografi

Topografi merupakan suatu penggambaran mengenai level kemiringan serta ketinggian wilayah dari permukaan laut. Suatu jenis tanaman dapat tumbuh atau tidak pada suatu wilayah tertentu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat kemiringan tanah.

Jika ingin fokus pada suatu sector pertanian, wilayah Nagari Belimbing merupakan wilayah yang cocok dan dapat ditubuhi oleh berbagai tanaman dan tumbuhan. Masih sangat banyak lahan tidur atau lahan yang belum dikelola dengan baik di Nagari Balimbing, hal ini karena aktivitas pertanian yang masih mengandalkan teknologi dan cara yang tradisional.

5. Kondisi Hidrologi

Hidrologi yaitu suatu penggambaran untuk sebuah sungai yang mengalir dan melintas pada suatu wilayah. Sungai adalah salah satu sumber air yang dapat dijadikan sebagai sumber irigasi atau pengarian untuk lahan pertanian. Melihat kondisi cuaca yang kebanyakan hujan dalam beberapa tahun belakangan dan cuaca yang semakin susah untuk diprediksi. Oleh karena itu penggunaan air sungai adalah salah satu alternative yang dapat digunakan agar aktivitas pertanian dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

6. Kondisi Demografi

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jika dilihat dengan kaca mata teoritis, maka wilayah dengan jumlah penduduk yang banyak memiliki modal pembangunan yang besar. Adapun maksud dari teori ini yaitu semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah sumber daya yang dapat diberdayakan sesuai dengan kemampuan dan kodratnya, serta sesuai dengan potensinya masing-masing. Begitu juga sebaliknya, jika sumberdaya yang banyak dan jumlah penduduk yang banyak namun tidak dapat diberdayakan dan dimanfaatkan dengan baik, maka hal ini bisa menjadi sebuah petaka dan beban dalam pembangunan nasional.

Jika dilihat dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Balimbing bahwa jumlah penduduk tahun 2020 sebesar \pm 8.917 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Menurut Kepadatan Nagari Balimbing
Tahun 2018-2020

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (M ²)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)
1	2018	8.783	29,44	298,33
2	2019	8.808	29,44	299,18
3	2020	8.917	29,44	302,85

Sumber: Data Agregat Kependudukan Nagari Balimbing 2020

b. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Tingkat kepadatan dan jumlah penduduk Nagari Belimbing termasuk normal jika dibandingkan dengan nagari-nagari lainnya. Penduduk di Nagari Balimbing tersebar dalam lima Jorong yang merupakan tempat atau kampung halamannya sejak lahir.

c. Struktur Umur

Kondisi struktur umur penduduk Nagari Balimbing sampai dengan akhir tahun 2009 tergolong komposisi struktur penduduk usia muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Balimbing Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

Jenjang penduduk	Jenis kelamin		
	L	P	L+P
Tidak/belum sekolah	134	126	260
Belum tamat SD /Sederajat	416	312	728
Tamat SD	1,463	1,480	2943
SLTP	648	597	1245
SLTA	744	715	1459
Diploma I	18	30	48
Akademi	43	66	109
Diploma IV	138	248	386
Strata II	6	7	13
Strata III	-	1	1
Jumlah	3.610	3.582	7.192

Sumber : Data Agregat Kependudukan Nagari Balimbing 2017

d. Tingkat kelahiran (Fertilitas)

Fertilitas merupakan satu dari banyak nya komponen utama pada kependudukan yang memberikan pengaruh pada pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah. Fertilitas sangat erat kaitannya dengan jumlah anak yang baru lahir serta jumlah kelahiran dari seorang wanita maupun sekelompok wanita.

Jumlah anak yang dilahirkan pada suatu rumah tangga tentu akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh pada tingkat kemakmuran sebuah rumah tangga. Tanggung jawab rumah tangga akan semakin besar saat melahirkan banyak anak, karena tentu rumah tangga perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhan baik material ataupun non material serta kebutuhan spiritual untuk setiap anggota keluarga. Rumah tangga yang masih berada dalam ketegori kurang mampu atau dengan kondisi ekonomi yang lemah, salah satu jalan atau langkah yang dapat diambil untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan membatasi jumlah kelahiran anak.

Mengambil langkah untuk mengurangi jumlah kelahiran atau jumlah anak, tentu saja yang menjadi sasaran pada program ini adalah

wanita pada usia tertentu. Adapun wanita yang dimaksud adalah wanita yang masih memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk dapat melahirkan anak. Usia tersebut dapat dikatakan rentang usia anatar tujuh belas tahun hingga tiga puluh lima tahun. Pada rentang usia tersebut wanita memiliki kemungkinan untuk melahirkan sangat besar. Usia ini disebut juga dengan usia subur (WUS) atau pasangan dengan usia subur (PUS) bagi yang telah menikah.

Pada suatu wilayah fertilitas dapat diukur dengan menggunakan TFR (*Total Fertility Rate*). Dengan demikian gambaran mengenai jumlah anak yang dilahirkan dalam suatu periode tertentu dapat diketahui. Di Nagari Balimbing sendiri, tingkat kelahiran bayi yaitu sejumlah 744 yang dari waktu ke waktu selalu mengalami penurunan. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat mulai sadar akan kesejahteraan anak adalah hal yang penting, serta perlu untuk membatasi jumlah anak.

Tingkat fertilitas dapat meningkat jika kesadaran seorang wanita untuk tidak menikah muda masih sangat minim. Hal ini erat kaitannya dengan semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan ia untuk terus melahirkan anak akan semakin tinggi dan semakin panjang. Jika tingkat fertilitas tidak dapat dikontrol maka kesejahteraan masyarakat sulit untuk diwujudkan.

Tidak hanya itu, kesejahteraan suatu keluarga, kesehatan diri setiap individu dalam masyarakat, serta kesehatan anak yang dilahirkan akan sangat dipengaruhi oleh usia perkawinan. Jika ibu melahirkan anak pada saat usianya masih muda, maka kemungkinan risiko yang akan dihadapi akan semakin besar. Risiko ini dapat berupa keselamatan saat melahirkan baik fisik maupun mental dalam menghadapi kehamilan dan proses melahirkan. Begitupun sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama (*melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB*), maka kemungkinan risiko yang dihadapi juga akan semakin rendah.

7. Perekonomian

Salah satu rencana strategis dari Nagari Balimbing adalah meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi. Sama dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah datar, pertumbuhan Ekonomi di Nagari Balimbing juga terus meningkat dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Meskipun sebenarnya belum memenuhi harapan perbaikan ekonomi yang sebenarnya. Melalui pemerintah Nagari Balimbing terus mencoba segala usaha untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dengan cara meningkatkan perekonomian keluarga dan rumah tangga serta berusaha untuk mencapai perwujudan pembangunan yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Segala sesuatu yang dicita-citakan tersebut dapat tercapai dengan langkah memberdayakan masyarakat serta semua kekuatan ekonomi yang dimiliki khususnya ekonomi mikro dan menengah serta koperasi.

Hingga hari ini ada banyak sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan serius. Hal ini khususnya potensi pada sektor pertanian yang memegang peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi nagari (akan dibahas pada bagian tersendiri). Sedangkan ada banyak sektor lain yang sejauh ini belum dikelola dengan baik, optimal dan serius yaitu sektor Usaha Kecil dan Mikro serta beberapa industri lainnya.

Dengan demikian, yang diharapkan dari setiap sektor ekonomi ini adalah peningkatan pada pendapatan nagari dan kemudian akan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

8. Pertanian, Perkebunan, Fasilitas Umum, Tanah Basah/Kolam dan Tanah Permukiman

Nagari Balimbing jika dilihat dari sisi geografis mempunyai banyak potensi alam yang sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan alam sebagai pusat kegiatan bertani di wilayah Nagari Balimbing.

Posisi Nagari Balimbing yang strategis serta menyesuaikan dengan kondisi alam, maka kebanyakan dari penduduk bekerja atau berprofesi sebagai petani. Adapun area persawahan yang ada di Nagari Balimbing \pm 795 Ha, area perkebunan \pm 1.050 Ha, Fasilitas Umum \pm 10 Ha, Tanah Basah/Kolam \pm 266 Ha dan Tanah Permukiman \pm 301 Ha. Dari kegiatan bertani yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Balimbing, hasil tani yang sangat terkenal adalah padi swah, coklat, serta hasil perkebunan lainnya baik itu jagung, kacang tanah, dan singkong.

Pada tahun 2016-2017 hasil perkebunan dan pertanian dari masyarakat selalu mengalami peningkatan pada setiap komoditinya, hingga menjadikan produk tertentu sebagai produk andalan. Dengan demikian sangat diharapkan agar hasil pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Balimbing.

9. Peternakan

Di Nagari Balimbing, sub sektor peternakan bukanlah mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah Nagari masih tetap memperlihatkan perhatian yang begitu besar bagi masyarakat yang memiliki peternakan atau yang bermata pencaharian sebagai peternak. Perhatian yang besar diberikan terutama bagi peternakan yang dilakukan secara berkelompok.

Jika dilihat potensi yang dimiliki oleh peternak di Nagari Balimbing dapat tergolong cukup potensial. Kenyataan dengan adanya kelompok-kelompok tani ternak merupakan satu-satunya yang mampu bertahan dan masih eksis, yang mana sebelumnya kelompok tersebut belum mendapat bantuan dari Pemerintah namun sudah mempunyai modal yang bisa diandalkan.

Kemudian, dengan adanya bantuan dari Pemerintah untuk mendukung kelompok tani ternak tersebut melalui LUEP, UKM, BKMN, GAPOKTAN, BPR, SPP dsb.

10. Pariwisata Religius

Adapun objek wisata yang ada di Nagari Balimbing seperti Rumah Tuo Kampai nan Panjang, Medan nan Bapaneh, Karambia Bacupang, Batu Paek, Batu tikam rajo, Batu tangkuik, Batu Palano dan juga situs bersejarah atau purbakala di Nagari Balimbing. Meskipun demikian, hal ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian masyarakat Balimbing untuk menjadi lebih baik.

11. Perdagangan

Beberapa masyarakat di Nagari Balimbing adalah pedagang serta ada yang merantau ke luar Sumatera Barat, namun meski demikian mereka tidak melupakan asal serta kampung halamannya.

B. Pembahasan

1. Deskripsi Hasil Penelitian Peserta PKH

Suatu program yang datang dari pemerintah untuk memberikan bantuan sosial dengan syarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta disahkan sebagai masyarakat penerima manfaat atau yang disebut dengan PKH. Program ini diberikan oleh pemerintah dalam rangka percepatan untuk menanggulangi masyarakat miskin, program ini dimulai pada tahun 2017. Sedangkan untuk di wilayah Tanah Datar PKH sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2013, yang dimulai pengadaannya pada enam kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar diantaranya Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Salimpaung.

Dalam penyaluran bantuan PKH terdapat beberapa kategori penerima manfaat, diantaranya:

Tabel 4. 3
Indeks Dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial PKH Tahun 2021

Kategori	Jumlah / Tahun
Ibu Hamil / Nifas	Rp. 3.000.000
Anak Usia Dini 0-6 Tahun	Rp. 3.000.000
Pendidikan Anak SD / Sederajat	Rp. 900.000
Pendidikan Anak SMP / Sederajat	Rp. 1.500.000
Pendidikan Anak SMA / Sederajat	Rp. 2.000.000
Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000
Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

Sumber : <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>

Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Nagari Balimbing dengan gambaran pendapatan masyarakat penerima PKH yang seiring waktu mulai meningkat dan juga disusul dengan meningkatnya jenjang pendidikan anak-anak penerima bantuan PKH membuktikan bahwa masyarakat miskin dapat diatasi. pendapatan keluarga, pendidikan dan kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Keluarga

Untuk dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera maka komponen pendapatan pada rumah tangga perlu untuk menjadi perhatian. Oleh karena itu pemerintah memulai dan membantu mewujudkan masyarakat sejahtera ini dengan memberikan bantuan Keluarga Harapan yang bertujuan supaya masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Tidak hanya itu, agar suatu keluarga bisa menuju sejahtera maka keluarga bersangkutan harus mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Maka dari itu, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penerima bantuan PKH tentang keberadaan Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Nagari Balimbing Indikator

Pendapatan Keluarga. Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada informan yang merupakan penerima bantuan PKH terkait jenis bantuan yang diterima yaitu berupa uang tunai satu kali dalam 3 bulan dan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sembako setiap bulannya.

Wawancara langsung pada tanggal 13 April 2021 dengan Ibu Erdawati penerima manfaat pada kategori pendidikan mengatakan bahwa bantuan yang beliau terima yaitu uang tunai satu kali dalam tiga bulan dan bantuan kebutuhan pokok seperti telur, bawang, cabe, dan minyak setiap bulannya. Dengan adanya bantuan PKH ini tentu akan membuat perubahan terhadap perekonomian masyarakat penerima manfaat, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 April 2021 kepada Ibu Asniarti, penerima manfaat dalam kategori pendidikan dan kesehatan mengatakan bahwa dengan adanya bantuan PKH ini beliau tidak terlalu memikirkan biaya sekolah anaknya karena adanya bantuan pendidikan dalam program PKH.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa program PKH yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu sejauh ini hanya dapat memberikan keringanan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari serta meringankan kebutuhan perlengkapan pendidikan. Bantuan yang diberikan terasa kurang optimal karena yang diberikan berbentuk uang tunai dan juga sembako, hal ini hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok serta kebutuhan sekolah anak saja. Padahal menurut masyarakat, selain dari bantuan Keluarga Harapan juga ada program pemerintah yang bernama KUBE, dan sebaiknya program ini juga dapat dijalankan dengan maksimal agar pendapatan masyarakat khususnya pendapatan dalam sebuah keluarga dapat lebih maksimal.

Lebih jauh lagi, juga dapat dilihat bahwa komponen yang diberikan belum dapat mendorong jumlah pendapatan keluarga dan program belum berjalan dengan optimal. Sudah seharusnya para pendamping

dari setiap wilayah Nagari dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk bekerja sama dan terus berkomunikasi dengan pemerintah agar dapat terlahirnya suatu program yang lebih optimal. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk dapat segera menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia dengan cara mengoptimalkan program PKH yang nantinya juga akan menjadi pendukung dari program-program lainnya.

b. Pendidikan

Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dijalankan semenjak 2017 tentunya mempunyai tujuan yang ingin di capai di masa depan, seperti mengurangi angka kemiskinan dengan cara memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik dengan akses pelayanan yang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Salah satu komponen pada program PKH adalah akses dan fasilitas pendidikan, hal ini bertujuan untuk menaikkan tingkat partisipasi masyarakat untuk program pendidikan dasar wajib dan minimal Sembilan tahun. Tidak hanya itu hal ini juga diharapkan untuk mengurangi tingkat anak yang bekerja atau pekerja di bawah usia yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu.

Program PKH yang diberikan pada anak dengan rentang usia tujuh hingga delapan belas tahun serta belum selesai dengan pendidikan dasar Sembilan tahunnya, maka wajib untuk mendaftar di sekolah formal dan wajib untuk mengikuti kelas atau jam pelajaran minimal 85% kehadiran. Masing-masing anak yang menerima bantuan program PKH baik program PKH nasional dan juga program PKH lokal.

Selain itu, tujuan dari program PKH juga untuk memberikan kemudahan pada orang tua agar dapat mengirim anaknya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan formal di bangku sekolah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa memberikan fasilitas pendidikan pada anak-anaknya dengan menggunakan dana yang diberikan pemerintah

sejumlah Rp.900.000 dan akan diberikan dalam waktu satu tahun secara bertahap.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nagari Balimbing mengenai bagaimana Peranan Program Keluarga Harapan terhadap pendidikan Keluarga Penerima Manfaat di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan. Dalam wawancara langsung yang dilakukan kepada Ibu Martalinda sebagai penerima manfaat dalam kategori pendidikan pada tanggal 12 April 2021, beliau mengatakan bahwa program PKH diberikan dalam kurun waktu tiga kali dalam satu tahun dan program PKH sangat membantu, terutama dibidang pendidikan. Dimana dana bantuan PKH juga bisa digunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan sekolah untuk anak seperti pakaian dan alat-alat tulis.

Ibu Masrina juga mengemukakan hal yang hampir sama, tentang peran PKH dalam hal pendidikan beliau mengatakan bantuan PKH sangat membantu di dalam pembiayaan sekolah anak.

Agar program Keluarga Harapan dapat berjalan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya, komponen pendidikan haruslah menjadi komponen utama yang dipertimbangkan. Hal ini agar tujuan utama dari program PKH yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan pada masyarakat dapat terwujud serta minat anak-anak untuk berkolah pun dapat ditingkatkan. Tidak hanya itu, dengan demikian, program ini juga akan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Dengan demikian, akan semakin banyak anak – anak Indonesia yang pendidikan nya tercukupi hingga hal ini dalam jangka panjang akan berdampak pada kualitas sumber daya Manusia di Indonesia hingga memudahkan mereka untuk mendapatkan ataupun membuat lapangan pekerjaannya sendiri.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diprioritaskan dalam sebuah keluarga. Namun, karena masih sangat

rendahnya pendapatan yang dimiliki oleh banyak keluarga miskin, akhirnya mereka tidak dapat dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan begitu juga dengan pendidikan. Hal ini termasuk dengan kebutuhan kesehatan yang paling dasar sekalipun. Banyaknya masyarakat yang tidak dapat memberikan pemeliharaan dan fasilitas maksimal bagi ibu hamil, tentunya hal ini kemudian akan berpengaruh pada kesehatan serta asupan gizi bayi yang dilahirkan.

Fasilitas kesehatan selama masa hamil, kemudian fasilitas persalinan dan pasca melahirkan atau nifas, adalah masa dimana kesehatan ibu dan bayi sangat dipertaruhkan. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan usaha pemerintah untuk mengurangi angka kematian saat ibu melahirkan baik angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Akses agar masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk menekan atau bahkan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Hal ini juga akan sangat erat kaitannya dengan tenaga kesehatan yang profesional untuk menangani proses melahirkan serta memberikan perawatan pasca melahirkan.

Tidak hanya itu, salah satu hal yang juga banyak terjadi di Indonesia dan telah menjadi masalah yang butuh perhatian adalah masalah balita stunting (pendek). Jika dilihat pada data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, masalah balita stunting adalah masalah tertinggi dan terbanyak terjadi jika dibandingkan dengan masalah kesehatan gizi lainnya pada anak, sebagai contoh masalah kurang gizi, kurus, maupun gemuk.

Suatu kondisi atau keadaan dimana balita tidak memenuhi ukuran tinggi atau panjang kaki yang normal dan sesuai dengan usianya disebut juga dengan stunting atau kerdil. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Stunting pada balita

dapat terjadi karena beberapa hal yang mempengaruhinya baik itu kondisi ekonomi keluarga, gizi yang tidak terpenuhi saat masih dalam kandungan, penyakit pada bayi, serta kurangnya asupan gizi pada bayi. Jika bayi atau balita mengalami stunting, hal ini akan sulit baginya untuk berkembang dengan baik secara fisik, kemampuan kognitif dan juga perkembangan otak yang tidak dapat berkembang dengan maksimal. (Hikmat, 2018 : 11-13)

Dari wawancara langsung pada tanggal 13 April 2021 dengan Ibu Tuti Muria yang merupakan keluarga penerima manfaat kategori pendidikan dan kesehatan mengatakan bahwa PKH sangat membantu untuk jaminan kesehatan dikarenakan adanya kegiatan posyandu yang dilaksanakan satu kali sebulan, yang diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan tingkat kesehatan anak yang berimbas pada tingginya angka tingkat kesehatan di wilayah Nagari Balimbing.

Lebih jauh lagi, kesehatan adalah faktor yang menjadi penentu dari terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Maka dari itu, program PKH menjadikan bidang kesehatan menjadi komponen utama. Komponen kesehatan ini bertujuan untuk memberikan akses dan fasilitas yang lebih memadai pada masyarakat miskin untuk terus meningkatkan kesehatan dan juga gizi pada ibu hamil, ibu nifas, serta balita yang berusia dua hingga tujuh tahun

2. Deskripsi Hasil Wawancara Pendamping PKH

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan kemiskinan. Pihak pendamping program ini merupakan pasukan bagi Kementerian Sosial untuk memberantas dan menaggulangi kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian, pendamping sangat perlu ilmu dan pengetahuan dalam menjalankan program ini. pengetahuan yang dimiliki itulah yang akan membantu pemerintah dan juga masyarakat mencapai tujuan awalnya.

Pada akhirnya yang diharapkan dari program ini adalah PKM dapat lulus dari PKH dan dapat lolos dari belenggu kemiskinan.

Dalam sebuah wawancara langsung dengan Ibu Devi Rantika, S.E pada tanggal 13 April 2021 selaku salah satu pendamping PKH di Nagari Balimbing terkait peningkatan pendapatan keluarga, beliau mengatakan bahwa dalam peningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Balimbing tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, jika dilihat secara keseluruhan Prohgram yang diberikan pemerintah berupa PKH juga diikuti dengan program KUBE. KUBE merupakan program kelompok usaha bersama. Bagi masyarakat penerima KUBE ini nantinya akan diberikan bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk modal usaha yang dilakukan secara berkelompok. Tidak hanya berupa bantaun modal usaha, namun jugakan dibimbing dan bina oleh pihak pemerintah, dengan harapan masyarakat yang mendapatkan bantuan program ini dapat memiliki suatu usaha yang berkembang serta dapat meningkatkan pendapatannya.

Maka dari itu, berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pandangan dan pendapat dari para pendamping program mengenai Peran Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Nagari Balimbing. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Devi Rantika, S.E tentang masyarakat yang tidak mendapatkan informasi serta tidak mengetahui tujuan dari program PKH. Ibu Devi menjelaskan bahwa sejauh ini tim pendamping selalu memberikan bimbingan serta sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang dijalankan sebelum pada akhirnya bantuan atau program diberikan kepada masyarakat. Akan diadakan suatu pertemuan yang dilakukan secara berkala setiap satu kali dalam tiga bulan. Meskipun pertemuan telah diatur dan dijadwalkan namun masih banyak masyarakat yang tidak hadir hingga mereka tidak paham mengenai tujuan dan konsep dari bantuan yang diberikan. Namun hal yang pasti

adalah pendamping pasti akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum program atau bantuan diberikan kepada masyarakat.

Hal itu juga dipengaruhi oleh adanya penyelewengan penggunaan dana bantuan PKH yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya, hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Devi Rantika, S.E bahwa sebagian besar bantuan Program Keluarga harapan (PKH) ini memuat beberapa komponen penting, dan jika ternyata ditemukan keluarga atau masyarakat yang menyalahgunakan dana bantuan ini, maka peringatan bagi yang bersangkutan akan diberikan oleh pendamping program. Hambatan lain dalam pengelolaan PKH ini adalah banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan PKH tanpa melihat kondisi perekonomiannya baik yang tidak mampu maupun yang sudah mampu. Dan juga sulitnya menumbuhkan kesadaran diri dari penerima manfaat yang sudah mampu untuk mengundurkan diri karena sudah memiliki kesejahteraan hidup.

Dari wawancara yang dilakukan kepada pendamping PKH Nagari Balimbing dapat disimpulkan bahwa PKH memberikan efek positif kepada masyarakat baik dalam segi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan dibidang pendidikan serta penurunan angka kemiskinan di Nagari Balimbing secara berangsur-angsur. Dengan demikian, masyarakat yang sudah mengundurkan diri dikarenakan sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi sandang, pangan dan papan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian yang penulis paparkan di atas ialah: Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing berjalan sesuai dengan tujuan didirikannya PKH ini, sebagaimana di atas sesuai dengan hasil penelitian dengan pendamping PKH, dan penerima PKH. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat penerima bantuan PKH mengenai peran Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Nagari Balimbing dengan indikator pendapatan keluarga dan pendidikan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yang merupakan penerima bantuan PKH terkait jenis bantuan yang diterima yaitu berupa uang tunai satu kali dalam 3 bulan dan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sembako setiap bulannya. Dari penelitian yang dilakukan, PKH memberikan efek positif kepada masyarakat baik dalam segi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Namun, hambatan PKH saat ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi untuk mengundurkan diri sebagai anggota PKH dan banyaknya masyarakat yang sudah mampu yang ingin mendapatkan dana PKH. Terlepas dari hal tersebut menurut hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan individual maupun kelompok, apa yang telah dicapai PKH dalam rangka preventif, kuratif, preservatif, dan developmental sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan dilihat dari graduasi mandiri yang dilakukan oleh peserta PKH meskipun belum mencapai hasil yang sempurna di dalam mengentaskan kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang peran Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Balimbing maka peneliti memberikan beberapa saran, di antaranya :

1. Diharapkan pendamping lebih giat dan aktif dalam menjalankan program-program PKH kepada masyarakat agar tercapainya tujuan PKH yaitu memberantas kemiskinan.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang sudah merasa mampu dalam hal ekonomi agar bersedia mengundurkan diri dari Program Keluarga Harapan (PKH) karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almizan. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol 1 No 1*.
- Arsyianti, I. S. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungkaes, H. R. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal Acta Diurna*.
- Chaniago, S. a. (2015). Pemberdayaan zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam, Vol 13 No 1*.
- Dahuri, I. N. (2012). *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Dzafina, C. (2019). *Desa Maju, Negara Maju*. Jawa Tengah: Literasi Desa Mandiri.
- Gampito. (2016). *Perekonomian Indonesia dan Ekonomi Internasional*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Habibah, A. N. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Herabudin. (2015). *Pengantar Sosiologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hikmat, R. H. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>. Diakses pada 01 Maret 2021
- <https://tanahdatarkab.bps.go.id/indicator/23/51/1/indikatorkemiskinan.html>. Diakses pada 30 September 2020
- Hulaimi, A. (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 2 No 1*.
- Ismail , D. B. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila & UUD 1945*. Erlangga.
- Itang. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, Vol 16 No 1*.

- Keuangan, D. J. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*.
- Marini, M. D. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora, Vol 2 No 1*.
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *jurnal Wiga, Vol 4 No 1*.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nursan, D. S. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia, Analisis Indikator Makroekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Hexagro, Vol 4 No 1*
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Setyorini, H. B. (2013). Budaya Kemiskinan Nelayan Di Mangunharjo Semarang. *Jurnal Sabda, Vol 8*.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media .
- Subhan, M. (2019). Paradigma Islam Tentang Kemiskinan Dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol 4 No 1*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2007). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suwinta, A. E. (2016). Implementasi Program Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. *Kajian Kebijakan Publik, Vol 1 No 1*.
- Wargadinata, W. (2011). *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.